

IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH KOTA GORONTALO

Heryati

Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Identifikasi kawasan permukiman kumuh perlu dilakukan tidak saja di kawasan-kawasan permukiman yang menjadi bagian kota metropolitan atau kota besar saja, tetapi juga pada setiap daerah (kota/kabupaten). Identifikasi dimaksudkan agar diketahui secara tepat lokasi permukiman kumuh untuk kemudian dirumuskan usaha-usaha penanganannya

Dalam melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh diperlukan kriteria-kriteria untuk penetapan kawasan kumuh. Secara garis besar kriteria dibedakan atas komponen fisik, komponen santasi lingkungan dan beberapa komponen tambahan.

Metode penetapan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan metode analisis komprehensif dimana penilaian dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria di atas. Dalam penentuan lokasi kawasan kumuh dengan Metode Analisis Komprehensif digunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil pembobotan selanjutnya dilakukan kategorisasi berdasarkan tingkat kekumuhan. Kemudian dari tingkat kekumuhan dilakukan penanganan berdasarkan karakteristik kawasan kumuh yang ditemukan.

Kata Kunci: Kawasan Kumuh, Identifikasi, Tingkat Kekumuhan, Penanganan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondisi demografi yang tidak stabil tercermin pada angka pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Parahnya jumlah penduduk yang cukup besar tidak dibarengi dengan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kondisi perekonomian yang morat-marit semakin menambah angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak pada degradasi kondisi fisik dan non fisik kehidupan dan penghidupan masyarakat yang secara nyata dan jelas tercermin pada menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakatnya. Dari 2 (dua) hal pokok inilah, yakni : angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan kondisi perekonomian yang buruk, terjadilah apa yang disebut dengan permasalahan perumahan dan permukiman bahkan yang paling buruk adalah terbentuknya permukiman kumuh atau kawasan kumuh.

Merancang Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi yang representatif menjadi suatu keharusan bagi kita. Keberadaan kota ini baik sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pelayanan pemerintahan di wilayah Gorontalo, merupakan daya tarik (*attracting power*) tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk tinggal menetap di daerah ini guna memperoleh kemudahan akses. Hal ini tentunya turut berpengaruh terhadap kebutuhan akan lahan permukiman.

Keterbatasan lahan Kota Gorontalo dengan luas 64.79 km², terlalu kecil untuk ukuran sebuah ibukota provinsi dan dirasa tidak mampu untuk menahan tekanan pertumbuhan penduduk, baik secara alamiah maupun akibat urbanisasi. Hal ini kemudian memicu tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh baru (*slum area*).

Kondisi seperti itu sudah semestinya mendapat perhatian dan dilakukan secara terus menerus dengan memberikan dorongan kepada pemerintah kota untuk menempatkan penanganan kawasan kumuh dan kemiskinan yang ada secara sungguh-sungguh dan meletakkannya pada prioritas utama pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota serta Rencana dan Strategi (Renstra) Sektoral di wilayahnya.

1.2 Tujuan

- 1) Menemukenali dan menetapkan kawasan-kawasan permukiman termasuk kawasan kumuh di Kota Gorontalo
- 2) Mendapatkan data kategori dan atau tingkatan kekumuhan pada masing-masing kawasan.
- 3) Untuk mengetahui penanganan kawasan kumuh sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo: 1997).

Di Indonesia, beberapa upaya perbaikan/peningkatan lingkungan permukiman kumuh telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat lingkungan setempat. Menurut Jayadinata (1986:11) pelaksanaan penanganan masalah kualitas lingkungan kumuh ini sedemikian kompleks dan tidak hanya terbatas pada lingkup lingkungan permukiman itu sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan kota, antar kota dan hubungan antara kota dan desa (*urban-rural linkages*): .

2.2 Dimensi Permukiman Kumuh

Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terajut dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Oleh karena itu permukiman kumuh harus senantiasa dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman

kumuh yang senantiasa harus mendapat perhatian serius (Suparno, 2006) adalah; Permasalahan lahan di perkotaan, Permasalahan prasarana dan sarana dasar, Permasalahan sosial ekonomi, Permasalahan sosial budaya, Permasalahan Tata Ruang Kota, Permasalahan Aksesibilitas.

2.3 Tipologi Permukiman Kumuh

Berdasar pada kajian dan pengamatan di lapangan, secara umum lingkungan permukiman kumuh dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) tipologi permukiman kumuh (Ditjen Perumahan dan Permukiman; 2002) yaitu; Permukiman kumuh nelayan, Permukiman kumuh dekat pusat kegiatan sosial ekonomi, Permukiman kumuh di pusat kota, Permukiman kumuh di pinggiran kota, Permukiman kumuh di daerah pasang surut, Permukiman kumuh di daerah rawan bencana, Permukiman kumuh di tepi sungai.

2.4 Teori Pendekatan Pembangunan Kumuh

Pendekatan yang saat ini diadopsi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh antara lain adalah *locally based demand*, pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan TRIDAYA, kesetaraan gender, dan penataan ruang yang partisipatif.

Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 5 UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta di dalam pembangunan perumahan dan permukiman dan pada Pasal 29 juga dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan di dalam pembangunan perumahan dan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraannya merupakan hal pokok yang harus dijalankan guna mewujudkan visi perumahan dan permukiman tersebut.

III. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo. Lokasi penelitian pada beberapa lokasi permukiman yang terindikasi kumuh. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka diawali dengan kegiatan persiapan, selanjutnya kegiatan identifikasi (observasi lokasi) dan terakhir dengan penentuan lokasi kawasan kumuh apakah suatu wilayah masuk dalam kategori permukiman kumuh ringan, sedang, dan berat.

3.1 Materi Penelitian

Beberapa materi penelitian yang sekaligus merupakan kriteria pada penetapan kawasan kumuh (Ditjen Pengembangan Permukiman: 2006).

1. Komponen Fisik: kepadatan penduduk, kondisi rumah, kepadatan bangunan, jumlah penghuni, sirkulasi udara.

2. Komponen Sarana dan Prasarana: air bersih (dari sungai, membeli, tidak ada pelayanan), MCK (septiktank), persampahan, drainase, jalan lingkungan, setapak
3. Komponen rawan terhadap bencana: banjir, tanah longsor

3.2 Metode Penetapan Kawasan Kumuh

Metode penetapan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan **metode analisis komprehensif** dimana penilaian dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria di atas. Dalam penentuan lokasi kawasan kumuh dengan Metode Analisis Komprehensif digunakan **metode kualitatif** dan **kuantitatif**, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun daftar panjang lokasi kawasan kumuh berdasarkan pendapat dari beberapa pakar, praktisi, stakeholder, akademisi dan kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan luas, jumlah rumah dan jumlah penduduk pada kawasan kumuh serta peruntukan kawasan berdasarkan RTRW.
2. Melakukan penilaian tingkat kekumuhan berdasarkan parameter dan kriteria yang telah ditetapkan, yang tujuannya untuk mengetahui derajat kekumuhan
3. Menginformasikan kondisi dan karakteristik kawasan kumuh terpilih (berdasarkan hasil penilaian tingkat kekumuhan) untuk mengetahui kondisi prasarana dan sarana permukiman agar penanganan yang akan dilakukan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas.

Dalam analisis ini, status kawasan kumuh dibagi dalam 3 kelas, yaitu : K1 = Kumuh Ringan, K2 = Kumuh Sedang, K3 = Sangat Kumuh/Kumuh Berat

Untuk jelasnya mengenai penetapan kriteria kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Pembobotan Terhadap Kriteria dan Kelas Kawasan Kumuh

No	Komponen Penilaian	Kriteria Kawasan	Bobot
I.	Komponen Fisik		
1.	Kepadatan Penduduk	100 – 150 jw/ha	2
		150 – 200 jw/ha	3
		> 250 jw/ha	4
2.	Kondisi Rumah	Permanen	2
		Semi Permanen	3
		Temporer	4
4.	Kepadatan Bangunan	Sedang	2
		Tinggi	3
		Sangat Tinggi	4
5.	Jumlah Penghuni	< 2 KK	2
		3 – 5 KK	3
		> 5 KK	4
6.	Sirkulasi Udara	Cukup	2
		Kurang	3

No	Komponen Penilaian	Kriteria Kawasan	Bobot
		Sangat Kurang	4
II Komponen Sanitasi Lingkungan			
1.	Air Bersih (dari sungai, membeli, tidak ada pelayanan)	5 – 40 %	2
		40 – 75 %	3
		> 75 %	4
2.	MCK (septik tank)	40 – 75 %	2
		5 – 40 %	3
		< 5 %	4
3.	Sampah	Sedikit dan tidak dikelola	2
		Sedang dan tidak dikelola	3
		Banyak dan tidak dikelola	4
4.	Drainase	Sedang	2
		Buruk	3
		Sangat Buruk	4
5.	Jalan Lingkungan	Sedang	2
		Buruk	3
		Sangat Buruk	4

Komponen Tambahan

No	Komponen Penilaian	Kriteria Kawasan	Bobot
III. Komponen Rawan Terhadap Bencana Alam			
1.	Banjir	Tidak	1
		Ya	4
2.	Tanah Longsor	Tidak	1
		Ya	4

Sumber: Dimodifikasi Konsultan dari Kriteria Kawasan Kumuh Ir. Budi D. Sinulingga, M, Si, 2007

Perhitungan tingkat kekumuhan didekati dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{\sum B}{\sum N}$$

dimana: I = Tingkat Kekumuhan , B = Nilai bobot kriteria, N = Komponen penilaian

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai berikut :

- Kumuh Ringan (K1) = 1 – 2
- Kumuh Sedang (K2) = 2 – 3
- Sangat Kumuh (K3) = 3 – 4

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1

Kategorisasi

Kawasan

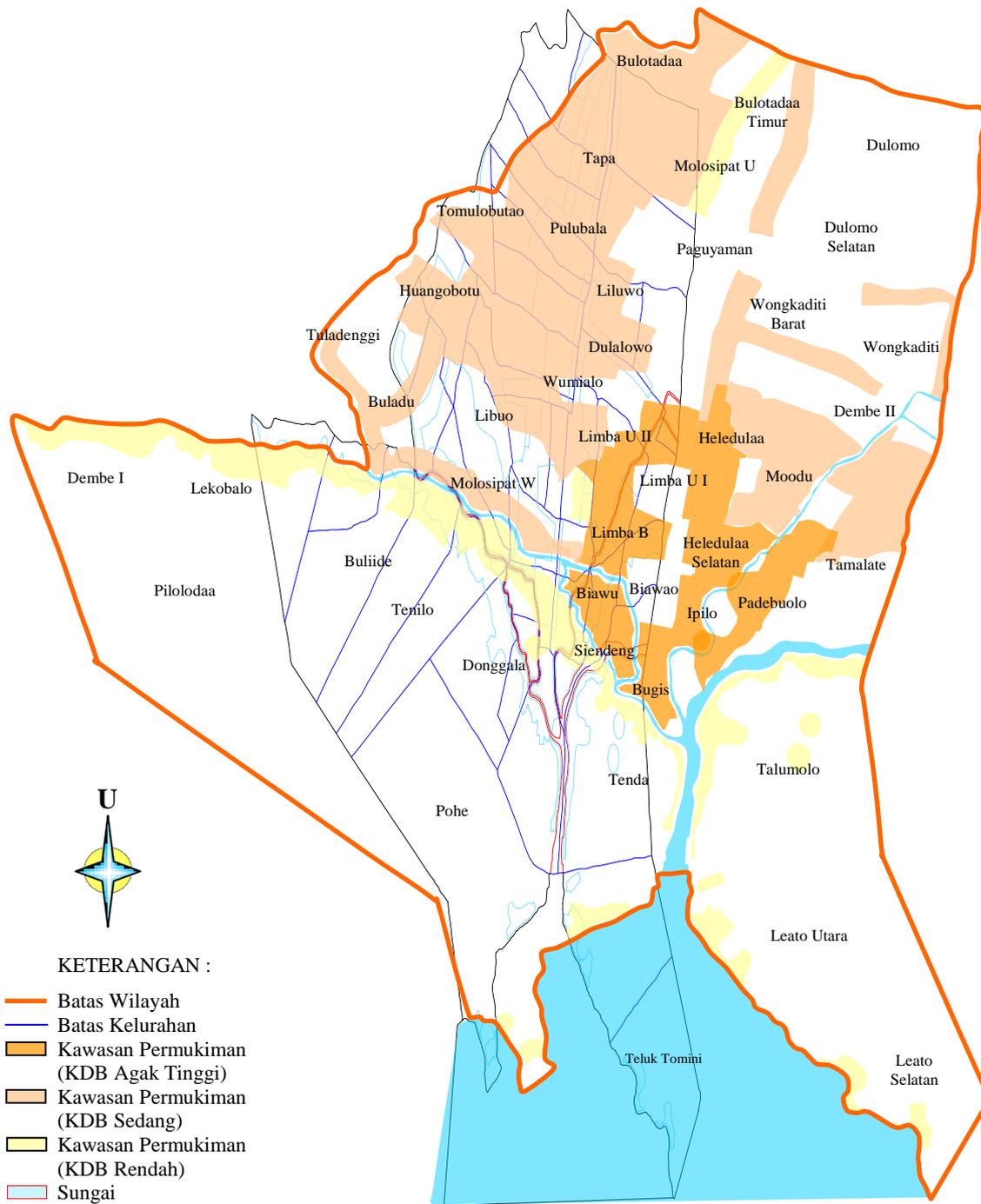
Permukiman

Tabel 4.1 List Permukiman di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

KATEGORI PERMUKIMAN	LOKASI (Kelurahan)	LUAS (ha)	JUMLAH UNIT	JUMLAH PENDUDUK		KONDISI LINGKUNGAN*		KONDISI INFRASTRUKTUR**
				JIWA	KK	KUMUH	TIDAK KMH	
A. FORMAL								
A.1 PNS / PEMDA	1. Kompi (Lama) - Liluwo	0,52	47	188	47		√	layak
	2. Perum. Perwira (lama) - Dulalowo	0,03	8		5		√	
	3. Aspol (Lama) - Tenda	1,50	101	412	101		√	kurang
	4. Kejaksaan (Baru) - (Wongkaditi)	1,00	66	179	44		√	kurang
A.2 REAL ESTATE	1. Kaputi Indah (lama)-Dulalowo	0,9	104	439	114		√	Layak
	2. Awara Karya (Lama) - Liluwo	2,25	160	640	160		√	kurang
	3. Asparaga (Lama) - Huangobotu	2,58	183	792	197		√	kurang
	4. Griya Seban – (Baru) Wumialo	0,46	53	162	49		√	layak
	5. Graha Air (baru) - Dulalowo	0,37	38	123	32		√	Sementara dalam Pembangunan
	6. Perum Panigoro (Baru) – Limba U-I	0,17	26	41	12		√	Sementara dalam Pembangunan
	7. Griya Wiyen Lestari (baru) – Wumialo	0,57	51	184	50		√	Sementara dalam Pembangunan
	8. Taman Indah (baru) - Wongkaditi Barat	0,2	75		41		√	kurang
	9. Mayoto Indah (Baru) – Wumialo	0,59	51	210	51		√	layak

KATEGORI PERMUKIMAN	LOKASI (Kelurahan)	LUAS (ha)	JUMLAH UNIT	JUMLAH PENDUDUK		KONDISI LINGKUNGAN*		KONDISI INFRASTRUKTUR**
				JIWA	KK	KUMUH	TIDAK KMH	
A.2 REAL ESTATE	10. Griya Rasaindo (Baru) - (Wumialo)	0,16	19	62	17		√	Sementara dalam Pembangunan
	11. Nabila Permai (Baru) - (Bulotadaa)	0,19	27	98	27		√	Sementara dalam Pembangunan
	12. Wilna Tama Permai (Baru) – Molosipat U	0,2	27	104	27		√	Layak
	13. Permata Ariel (Baru) – Molosipat U		19	62	19		√	Sementara dalam Pembangunan
	14. Graha 42 (Baru) – Molosipat U	0,78	99	381	93		√	Sementara dalam Pembangunan
	15. Griya Alien Permai (Baru) - Liluwo	0,19	18	52	16		√	kurang
	16. Insar Pratama (Baru) – Wumialo	0,15	12	45	12		√	kurang
	17. Anindya (Baru) - Molosipat U	1,2	55	230	55		√	kurang
A.3 PERUMNAS	1. Pulubala (Lama)	10	619	3670	734		√	kurang
	2. Tamulabutao	9,7	556	2815	563		√	layak
B. SWADAYA								
B.1 KAMPUNG	1. Siendeng	45	486	2998	823	√		Kurang
	2. Biawu	62	527	3013	756	√		Kurang
	3. Lekobalo	85	509	2982	812	√		Kurang
	4. Wumialo	145		4189	1024		√	Kurang
	5. Tamulabutao	91	535	2526	607		√	Kurang
	6. Huangobotu	123	1353	5288	1371		√	Kurang
	7. Dembe I	87	675	3351	901	√		Kurang
	8. Limba B	112	1016	5298	1439	√		kurang
	9. Bugis	48	756	4215	1255	√		kurang

KATEGORI PERMUKIMAN	LOKASI (Kelurahan)	LUAS (ha)	JUMLAH UNIT	JUMLAH PENDUDUK		KONDISI LINGKUNGAN*		KONDISI INFRASTRUKTUR**
				JIWA	KK	KUMUH	TIDAK KMH	
B.1 KAMPUNG	10. Tenda	39	946	5389	1391	√		kurang
	11. Dembe II	158	748	4019	1090	√		kurang
	12. Dulalowo	135	710	3627	771		√	Kurang
	13. Biawao	39		1873	526	√		Kurang
	14. Limba U I	48	640		1030		√	kurang
B.2 NELAYAN	1. Leato Utara	145	354	2312	622	√		Kurang
	2. Leato Selatan	206	474	2288	649	√		Kurang
	3. Pohe	287	139	2349	592	√		Kurang
B.3 APUNG (jika ada/jenis lain)	1. -	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 4.1 Peta Tingkat Kepadatan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo

Tabel 4.2 Daftar Pemilihan Lokasi Kawasan Kumuh

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Rumah Kws Kumuh (unit)	Jumlah Penduduk Kws Kumuh (jiwa)	Peruntukan Kws Berdasarkan RTRW
1	2	3	4	5	6
I.	Kecamatan Kota Selatan				
1.	Kelurahan Siendeng				Permukiman/Garis
	a. Kawasan RT 2 /RW 4	0,2	24	118	Sempadan Sungai (GSS)
2.	Kelurahan Biawu				
	a. Kawasan RT 4/RW 4	0,5	60	120	Perdagangan (Pasar)/GSS
3.	Kelurahan Tenda				
	Kawasan RT 03/RW 04	0.4	43	164	Permukiman
4.	Kelurahan Limba B				
	a. Kawasan RT 2/RW2	0,08	12	102	Sekitar pusat bisnis/perdagangan
5.	Kelurahan Pohe				
	a. Kawasan RT 02/RW 03	0,9	30	163	Permukiman
6.	Kelurahan Biawao				
	a. Kawasan RT 02/RW 02	0,49	64	355	Kawasan Perdagangan
II.	Kecamatan Kota Timur				
1.	Kelurahan Bugis				
	Kawasan RT 3/RW 7	0,14	19	57 KK	Permukiman/GSS
2.	Kelurahan Leato Utara				
	Kawasan RT 2/RW2	1,2	31	38	Permukiman/Lereng
III.	Kecamatan Kota Barat				
1.	Kelurahan Dembe I				
	Kawasan RT 3/RW 1	0,07	17	79	Danau
2.	Kelurahan Lekobalo				
	Kawasan RT 3/RW 3	1,13	98	416	Permukiman/danau
V.	Kecamatan Kota Utara				
1.	Kelurahan Dembe II				
	Kawasan RT 1/RW 1	0,43	16	185	Permukiman/dataran

Sumber: Wawancara dan Pengamatan, tahun 2008

Perhitungan tingkat kekumuhan didekati dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{\sum B}{\sum N}$$

dimana: I = Tingkat Kekumuhan , B = Nilai bobot kriteria, N = Komponen penilaian

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai berikut :

- Kumuh Ringan (K1) = 1 – 2
- Kumuh Sedang (K2) = 2 – 3
- Sangat Kumuh (K3) = 3 – 4

Tabel 4.3 Klasifikasi Kawasan Kumuh di Kota Gorontalo

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Bobot Kekumuhan	Klasifikasi Kekumuhan	Keterangan
II. Kecamatan Kota Selatan				
1.	Kelurahan Siendeng			
	Kawasan RT 2/RW 4	2,4	Legal	Rawan Banjir dan Longsor
2.	Kelurahan Biawu			
	RT 4/RW4	2,93	Illegal	Rawan Banjir
3.	Kelurahan Tenda			
	Kawasan RT 03/RW 04	2,67	Legal	Rawan Longsor/Banjir
4.	Kelurahan Limba B			
	Kawasan RT 2/RW 2	3	Ilegal	Rawan Banjir
5.	Kelurahan Pohe			
	Kawasan RT 02/RW 03	2,47	Legal	
6.	Kelurahan Biawao			
	Kawasan RT 02/RW 02	2,47	Legal	Rawan Banjir
II. Kecamatan Kota Timur				
1.	Kelurahan Bugis			
	Kawasan RT 3/RW 7	2,4	Legal	Rawan Banjir
2.	Kelurahan Leato Utara			
	Kawasan RT 02/ RW 02	2,47	Legal	Rawan Longsor
III. Kecamatan Kota Barat				
1.	Dembe I			
	Kawasan RT 3/RW 1	2,67	Illegal	Rawan Banjir
2.	Kelurahan Lekobalo			
	Kawasan RT 3/RW3	2,60	Ilegal	Rawan Banjir
V. Kecamatan Kota Utara				
1.	Kelurahan Dembe II			
	Kawasan RT 1/RW1	2,3	Legal	Genangan

Sumber: Pengamatan, tahun 2008

4.2 Hasil Analisis

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Gorontalo terdapat kawasan kumuh yang dikategorikan sebagai kawasan *Kumuh berat* (K3) pada 1 lokasi, *kumuh sedang* (K2), dan *Kumuh Ringan* (K1)

Tingkat kekumuhan di Kota Gorontalo disebabkan karena faktor:

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu komunitas sangat mempengaruhi kualitas lingkungan dimana masyarakat tersebut bermukim. Karena hal ini bisa mempengaruhi perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Dari hasil pengamatan di lapangan pada kawasan yang masuk kategori berat sebagian besar masyarakat dalam kawasan hanya berpendidikan SD sampai dengan SLTP bahkan anak usia 7-12 tahun enggan untuk sekolah selain karena masalah ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

2. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakat dan keduanya sangat berkorelasi dengan kualitas lingkungan suatu kawasan. Pada kawasan yang termasuk kumuh berat (Limba B) sebagian besar masyarakatnya termasuk masyarakat prasejahtera yang punya penghasilan

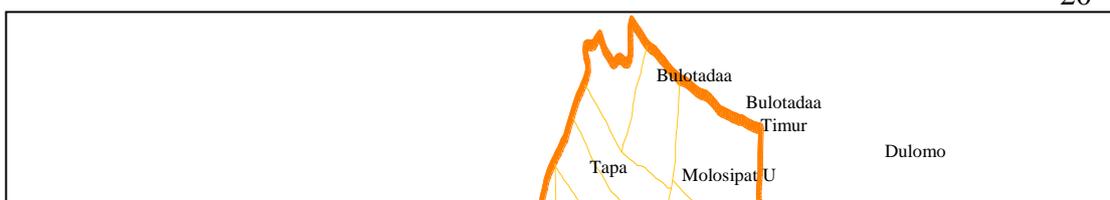
tidak tetap karena sebagian besar bekerja pada sektor informal seperti pembantu RT, buruh bangunan, tukang bendor, dan penjual kue. Sehingga hal ini membuat masyarakat setempat tidak bisa berbuat banyak apalagi peduli akan lingkungan sekitar.

3. Sarana dan Prasarana

Kurang maksimalnya fungsi sarana dan prasarana lingkungan ditambah dengan tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat lebih memperburuk kondisi lingkungan. Umumnya kawasan di Kota Gorontalo yang masuk kategori kumuh terdapat genangan walaupun dengan intensitas hujan yang rendah sudah dapat menggenangi rumah penduduk. Kondisi sarana dan prasarana di lokasi pengamatan adalah sbb:

- a. Tidak maksimalnya fungsi saluran sehingga menyebabkan saluran meluap karena pendangkalan, dan tersumbat akibat sampah baik yang berasal dari kawasan permukiman sendiri maupun sampah bawaan dari kawasan lain seperti sampah pasar.
- b. Tidak adanya jaring pengaman sampah pada saluran pembuangan pasar sentral yang bermuara pada saluran permukiman di kawasan RW I Kelurahan Limbah B.
- c. Tidak ada jarak antara bangunan dengan jalan/sungai (garis sempadan jalan/sungai). Kondisi ini nampak jelas pada lokasi disekitar pinggiran bukit (Lekobalo, Dembe I, Leato utara, Leato Selatan, pohe, Tenda) dan area bantaran sungai seperti Kampung Bugis, Siendeng, Biawu, dan Biawao.
- d. Sebagian masyarakat tidak punya akses ke PDAM sehingga mengkonsumsi air sumur yang dekat dengan pembuangan limbah.
- e. Tidak adanya sarana MCK, masyarakat memanfaatkan saluran/sungai untuk BAB.
- f. Umumnya tidak ada saluran pembuangan untuk limbah rumah tangga, sehingga sebagian besar limbah rumah tangga dibuang begitu saja ke halaman/jalan.
- g. Tidak adanya akses jalan yang memadai
- h. Beberapa permukiman yang berada sepanjang pinggiran bukit rawan longsor, sebagian besar saluran masih bersifat alami (belum tertangani).
- i. Persampahan yang belum dikelola secara benar.
- j. Tingkat kepadatan bangunan yang relatif tinggi dan kondisi fisik bangunan yang sebagian besar masih konstruksi non permanen khususnya pada kawasan kategori kumuh berat

Secara lengkap sebaran kawasan kumuh di Kota Gorontalo tersaji pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.2



Gambar 4.2 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kota Gorontalo

4.3. Penanganan Kawasan Kumuh

4.3.1 Strategi Pendekatan Penanganan Permukiman Kumuh

Berdasarkan pada pengamatan di lapangan, karakteristik permukiman kumuh di Kota Gorontalo, diklasifikasikan menjadi: permukiman kumuh nelayan, Permukiman kumuh pusat kota/pusat kegiatan sosial ekonomi, dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana.

➤ Permukiman Kumuh Nelayan

Karakteristik Permukiman

Sebagian besar jenis mata pencaharian penduduknya adalah nelayan atau lainnya yang terkait dengan kegiatan nelayan, misalnya pedagang ikan, pengolah ikan, dan berbagai hasil laut lainnya. Hampir semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan nelayan ini, seperti halnya pengolahan ikan dan berbagai hasil lautnya berlangsung di lingkungan permukiman ini. Pada umumnya tingkat pendapatan masyarakat nelayan ini tidak menentu karena kegiatan ekonominya sangat tergantung pada musim.

Permukiman nelayan di Kota Gorontalo terdapat di Kelurahan Pohe, Leato Utara, Leato Selatan. Dilihat dari topografinya karakteristik permukimannya terbagi 2. Karakteristik permukiman yang berada di pesisir pantai (sisi bawah jalan) dan karakteristik permukiman yang berada sisi atas jalan merupakan lereng). Dari hasil pengamatan di lapangan pada umumnya pola tata bangunan dan lingkungannya kurang teratur dengan tingkat kepadatan cukup tinggi.

➤ **Permukiman Kumuh Dekat Pusat Kegiatan Sosial Ekonomi**

Karakteristik Permukiman

Permukiman kumuh di dekat pusat kegiatan sosial ekonomi adalah permukiman kumuh yang terletak di sekitar pusat-pusat aktivitas sosial ekonomi, seperti halnya lingkungan industri, lingkungan pusat pelayanan ekonomi, lingkungan pendidikan/kampus, dan pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi lainnya. Untuk kota Gorontalo permukiman ini terletak di pusat kota yang juga merupakan kawasan kota lama, yang masih menyisakan sebagian karakter signifikansi warisan budayanya baik itu berupa arsitektur, pola (*pattern*) permukiman, aktivitas sosial-budaya dan sosial-ekonominya, maupun permukiman yang sama sekali sudah tidak meninggalkan karakter warisan budayanya namun pada dasarnya bagian dari konfigurasi pola kota (*urban fabric*) kota lama yang masih menunjukkan karakter warisan budaya yang jelas dan nyata.

Karakteristik permukiman ini berada Kel. Limba B, Biawu, Biawao, Limba U I, dan Limba U II.

Karakteristik permukiman kumuh di dekat pusat pelayanan ekonomi adalah; jenis mata pencaharian yang ada lebih beragam, baik yang formal maupun informal. Pada umumnya penduduk setempat maupun pendatang secara ekonomi terkait secara formal maupun informal dengan berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan pusat pelayan ekonomi ini.

➤ **Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Bencana**

Permukiman kumuh ini berada di sekitar berbukitan (Leato Selatan, Leato Utara, kampung Tenda) yang juga sebagian merupakan kawasan permukiman nelayan yang berada di kaki bukit (Leato utara dan Selatan) adalah merupakan kawasan rawan longsor dan kawasan yang berada di bantaran sungai seperti; Siendeng, Kampung Bugis, Biawu, Biawao, yang merupakan kawasan rawan banjir.

4.3.2 Pendekatan Penanganan Kawasan Kumuh

Tindakan penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan pendekatan penanganan pada *Property Development, Community Based Development, Guided Land Development*. Pendekatan penanganan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil-hasil penilaian kriteria pembentuk kawasan permukiman kumuh.

➤ **Pendekatan *Property Development***

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kawasan permukiman kumuh akan dikelola secara komersial agar ekonomi lokasi yang tinggi dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan kawasan dan daerah. Dalam hal ini masyarakat penghuni kawasan berkedudukan sebagai kelompok sasaran perumahan, pemerintah sebagai pemilik aset (tanah) dan swasta sebagai investor..

➤ ***Community Based Development***

Kawasan kurang bahkan tidak mempunyai nilai ekonomis komersial. Dalam hal ini kemampuan masyarakat penghuni sebagai perhatian utama. Masyarakat didudukan sebagai pemeran utama penanganan.

➤ ***Guided Land Development***

Kawasan kurang bahkan tidak mempunyai nilai ekonomis komersial. Dalam hal ini penekanan lebih mengarah dan melindungi hak penduduk asal untuk tetap tinggal pada lokasi semula.

Dengan memperhatikan karakteristik kawasan kumuh d Kota Gorontalo dan dengan memperhatikan kriteria untuk setiap pendekatan penanganan maka dibuat klasifikasi penanganan untuk 3 kawasan permukiman kumuh prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.4 Klasifikasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan Permukiman Kumuh	Indikasi Permasalahan		Tingkat Kekumuhan	Alternatif Solusi Penanganan
	Karakteristik	Permasalahan		
A. Limba B	<ul style="list-style-type: none"> - Terletak di sekitar kegiatan ekonomi - Berada di Pusat Kota - Tingkat Kepadatan cukup tinggi - Kondisi Prasarana sangat minim - Bangunan sebagian besar non permanen. - Beberapa bangunan merupakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan merupakan area banjir walaupun dengan intensitas hujan yang rendah - Pendang kalan saluran - Persampahan tidak tertangani - Beberapa bangunan merupakan Bangunan liar 	Kumuh Berat	<i>Property Development</i>

	<p>bangunan liar, yakni bangunan yang berdiri di atas saluran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status tanah sebagian bukan hak milik 	<ul style="list-style-type: none"> - MCK tidak berfungsi 		
B. Kel. Biawu	<ul style="list-style-type: none"> - Terletak disekitar kegiatan ekonomi - Berada di pusat kota. - Sebagian kawasan berada di area bantaran sungai dan sebagian menempati kawasan pasar. - Tingkat kepadatan bangunan dan penduduk cukup tinggi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan merupakan area banjir - Drainase tidak berfungsi - Persampahan dan Limbah RT tidak tertangani - Beberapa bangunan merupakan bangunan liar - Tidak ada saluran drainase lingkungan khususnya permukiman yang berada disekitar sungai. - Jalan lingkungan sebagian dalam kondisi buruk - Drainase sebagian besar tidak berfungsi (tersumbat dan beberapa titik saluran terputus 	Kumuh Sedang	<i>Property Development</i>

<p>C. Kel Leato Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terletak di pinggir kota (*kaki bukit) - Kondisi topografis berupa lereng - Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian nelayan - Tingkat kepadatan penduduk dan bangunan sedang - Status tanah hak milik bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan merupakan area rawan longor - Drainase masih bersifat alami - Pembuangan limbah cair RT belum tertangani - Persampahan belum tertangani - Jalan lingkungan belum terbangun - Pedestrian sebagian besar belum terbangun, sebagian terbangun tapi dalam kondisi buruk 	<p>-Kumuh Sedang</p>	<p><i>Guided Land Development</i></p>
---------------------------	--	--	----------------------	---------------------------------------

Tabel 4.5 Matriks Indikasi Program Pengembangan

No	USULAN PROGRAM	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
		A	B	C
A.				
1.	Pembangunan jln lingkungan			x
2.	Peningkatan jalan lingkungan	x	x	x
3.	Pedestrianisasi	x	x	x
B.				
1.	Saluran Baru		x	x
2.	Rehabilitasi Saluran	x	x	
3.	Perbaikan Saluran Lingkungan	x	x	x
4.	Pembuatan/Perbaikan anggul Sungai			
C.				
1.	Pengembangan jaringan	x	x	x
2.	Hidran Umum	x	x	
D.				
1.	Pengembangan instalasi		x	x
2.	Pembangunan MCK baru	x	x	x
3.	Perbaikan MCK	x	x	
4.	Pembuatan resapan air pada rumah yang belum memiliki WC ideal	x		

Keterangan :

A : Limba B

B : Biawu

C : Leato utara

No	USULAN PROGRAM	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
		A	B	C
E.				
1.	Pembangunan Rumah Sehat Huni	x	x	
2.	Rehab. Rumah Darurat	x	x	
F.				
1.	Pembuatan TPS	x	x	X
2.	Peningkatan Armada Pengangkut Sampah			

V. KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Gorontalo terdapat kawasan kumuh yang dikategorikan sebagai kawasan *Kumuh berat (K3)*, *kumuh sedang (K2)*, dan *Kumuh Ringan (K1)*

Tingkat kekumuhan di Kota Gorontalo disebabkan karena faktor Tingkat Pendidikan, Faktor Ekonomi, Kurangnya Sarana dan Prasarana.

Dilihat dari letaknya karakteristik permukiman kumuh di Kota Gorontalo, diklasifikasikan menjadi:

- Permukiman kumuh nelayan.
- Permukiman kumuh pusat kota/pusat kegiatan sosial ekonomi.
- Permukiman kumuh di daerah rawan bencana.

Berdasarkan karakteristik permukiman kumuh, maka penengangan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni:

1. *Property Development*
2. *Community Based Development*
3. *Guided Land Development*

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. 1992. *Sejumlah Masalah Permukiman Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Budiharjo, Eko. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal. 2006. *Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh*. Dirjen Cipta Karya.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal. 2006. *Panduan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kota*. Dirjen Cipta Karya.
- Frick, Heinz. 1984. *Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan*. Yogyakarta: Kanisius
- Jayadinata, T. 1986. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Sastra, S. Marlin, E. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-undang RI No 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.